

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026



DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2026 dapat disusun yang berpedoman pada RPD Kota Payakumbuh tahun 2026-2030 dan Renstra Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2026-2030 yang berguna sebagai acuan Rencana Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Pembangunan bidang sosial yang akan berjalan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan dan telah memberikan manfaat besar terhadap masyarakat khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Oleh karena itu perencanaan-perencanaan yang konsisten dan berkesinambungan terhadap hak-hak dasar warga masyarakat yang termarginalkan di Kota Payakumbuh adalah menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Sosial Kota Payakumbuh.

Dalam penyusunan Perubahan Renja ini, masih terdapat kekurangan, baik dalam pengolahan dan penyajian data. Untuk itu segala saran yang bersifat membangun senantiasa diharapkan demi perbaikan serta penyempurnaan Perubahan Renja ini dengan harapan Perubahan Renja yang telah dibuat ini dapat terlaksana tepat waktu, transparan dan akuntabel.

Payakumbuh, April 2026

Kepala Dinas Sosial
Kota Payakumbuh



YONREFLI, S.Sos,M.AP

NIP. 19691108 199 03 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2025	
2.1 Evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah Triwulan II	5
2.2 Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN PENDANAAN DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2026	
3.1 Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional	24
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial pada Perubahan Renja 2026	24
3.3 Rencana Kerja pada Perubahan 2026	25
BAB IV PENUTUP	30
LAMPIRAN	39

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2025	7
TABEL 2.2 PENCAPAIAN PELAYANAN KINERJA DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH.....	22
TABEL 3.1 TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH	24
TABEL 3.2 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKPD) KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2026 yang disusun sebagai bahan acuan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran, dengan sendirinya harus memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang selama pelaksanaan kegiatan sampai triwulan II serta memperkirakan keadaan masa yang akan datang dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2026 sehingga dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal dalam upaya mewujudkan tujuan Dinas Sosial Kota Payakumbuh.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial tahun 2026 berpedoman kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh tahun 2025–2029 serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial tahun 2025-2029.

Untuk mewujudkan tujuan yang tertuang dalam dokumen perencanaan tersebut diatas disusun program wajib dan prioritas, dengan mempertimbangkan sumber daya dan faktor-faktor pendukung. Penyusunan Renja Perubahan OPD mempunyai arti yang strategis untuk penyelenggaraan program pembangunan yang sistematis, memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Perencanaan yang dibuat merupakan Rencana Kerja Dinas Sosial untuk 1 (satu) tahun.

Adanya perubahan anggaran pada Dinas Sosial Kota Payakumbuh dikarenakan Dinas Sosial menempati gedung baru dimana sarana dan prasarana sangat minim dan perlu penambahan peralatan baru untuk menunjang pekerjaan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial berdasarkan pada :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No 21, Tambahan Lembaran Negara RI No 4817);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 136);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan, dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
13. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 202 Tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 3) ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2023 tentang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13);Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2024;
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);

17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 69);
18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 68);
19. Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Penyusunan renja Dinas Sosial ini dimaksudkan untuk sebagai berikut :

1. Sebagai evaluasi dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya yang dijadikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja kedepan
2. Menetapkan rencana kerja perubahan 1 (satu) tahun untuk tahun anggaran berikut sebagai dasar dalam penetapan APBD tahun anggaran berikut
3. Menetapkan program, kegiatan, tujuan, sasaran dan hasil yang akan dilaksanakan dan dicapai yang dituangkan dalam dokumen renja Perubahan Dinas Sosial

Tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinas Sosial ini adalah :

1. Pedoman dan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan berdasarkan hasil pelaksanaan sebelumnya.
2. Dokumen yang menjadi acuan bagi Dinas Sosial untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam periode 1 (satu) tahun berjalan.

3. Gambaran yang jelas dan terarah mengenai sasaran, tujuan dan hasil yang akan dicapai dari renstra Dinas Sosial yang telah ditetapkan.
4. Menetapkan tujuan dan hasil yang akan dicapai dari rencana kerja dan rencana kerja tahun berikutnya

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 : Latar Belakang
- 1.2 : Landasan Hukum
- 1.3 : Maksud dan Tujuan
- 1.4 : Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah Triwulan I
- 2.2 Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN PENDANAAN DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2026

- 3.1 Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial pada Perubahan Renja
2026
- 3.3 Rencana Kerja pada Perubahan 2026

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL

2.1 Evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan I

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Payakumbuh yang terdiri dari 6 program, 12 kegiatan dan 32 Sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 5.098.708.479,-: untuk triwulan I terealisasi sebesar Rp 762.043.088,- atau sebesar 14,94%

Berikut justifikasi penyebabnya, faktor pendorong keberhasilan kinerja, faktor penghambat dan tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya, sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.935.488.004,- pada triwulan I terealisasi sebesar Rp.746.270.192,- atau 14,63 %

Faktor Penghambat :

1. Kesalahan rekening penggajian P3K Paruh waktu Rencana Aksi
1. Melakukan Pergeseran Anggaran

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 210.793.575,- terealisasi sebesar Rp 5.367.639,- atau 0.11%

Faktor Penghambat :

1. Adanya keterlambatan administrasi penyelesaian SK untuk Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

Rencana Aksi :

1. Mempercepat proses penyelesaian SK PSM
2. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan langsung menyelesaikan administrasi pertanggungjawabannya.

3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 494.672.450,- terealisasi sebesar Rp 4.070.000,- atau 2,9% dengan capaian kinerja 1%.

Faktor Penghambat :

1. Penyaluran bantuan permakanan memang direncanakan di Triwulan II
2. Beberapa kegiatan bersifat situasional

Rencana Aksi :

1. Mempercepat dan mempersiapkan administrasi penyaluran bantuan
2. Melaksanakan kegiatan sesuai situasi yang telah terjadi dan langsung menyelesaikan administrasi pertanggungjawabannya

4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 316.692.050,- terealisasi sebesar Rp 3.434.007,- 0.08%.

Faktor Penghambat :

1. Verifikasi dan validasi dilakukan pada triwulan II karena persiapan administrasi yang cukup lama.

Rencana Aksi :

1. Mempercepat dan mempersiapkan administrasi agar penyaluran bantuan bisa dilaksanakan dengan cepat.
2. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal dan langsung menyelesaikan administrasi pertanggungjawabannya

5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 103.468.350,- terealisasi pada triwulan I sebesar Rp 985.000,- atau 0.07%.

Faktor Penghambat :

1. kegiatan pada program ini terlaksana berdasarkan situasi dan kondisi atau bersifat situasional.

Rencana Aksi :

1. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal dan langsung menyelesaikan administrasi pertanggungjawabannya

6. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 37.594.050,- Pada triwulan I baru terealisasi sebesar Rp 1.916.250,- atau 0,04%

Faktor Penghambat :

1. Program ini dilaksanakan pada Hari Pahlawan 10 November 2026.

Rencana Aksi :

1. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal dan langsung menyelesaikan administrasi pertanggungjawabannya.

TABEL 2.1
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN 1 TAHUN 2026 KOTA PAYAKUMBUH

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2029 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
1	2	3	4	6		7		8		9		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
		1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		63.160.740.881	3.656.418.098	5.098.708.479	762.043.088	762.043.088	762.043.088	20	1.2						
		1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		24.713.663.078	3.650.592.178	3.935.488.004	746.270.192	746.270.192	746.270.192	23	3	Dinas Sosial					
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	93		30	30	30	30	32.3	0						
		1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		287.057.200	43.361.053	44.184.550	7.353.200	7.353.200	7.353.200	3.85	2.56						
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi								0	0						
		1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		11.262.700	1.807.958	1.476.050	-	-	-	0	0						
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	9	9	9	0	0	0	0	0						
		1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		255.669.500	41.553.095	38.683.500	7.353.200	7.353.200	7.353.200	15.4	2.88						
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	13	8	4	2	2	2	15.4	0						
		1.06.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		10.062.500	-	2.012.500	-	-	-	0	0						

	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		0		1		0		0		0		0		0
1.06.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			10.062.500		-		2.012.500		-		-		-		0	0
	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1		0		1		0		0		0		0	0	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			18.597.758.461		2.476.551.810		3.249.815.969		693.527.654		693.527.654		693.527.654		100	3.73
	Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu															0	0
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			17.700.218.461		2.274.577.810		2.976.275.969		655.617.654		655.617.654		655.617.654		100	3.7
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2 1		2 1		21		21		21		21		100	0	
1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			897.540.000		201.974.000		273.540.000		37.910.000		37.910.000		37.910.000		100	4.22
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1 2		1 2		12		12		12		12		100	0	
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			160.329.600		28.160.000		-		-		-		-		0	0
	Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah															0	0
1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			160.329.600		28.160.000		-		-		-		-		0	0
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3 2		0		32		0		0		0		0	0	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.211.432.690		288.427.147		120.056.065		9.769.562		9.769.562		9.769.562		17.7	0.81
	Indeks layanan administrasi perangkat daerah															0	0
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			19.291.850		6.736.590		3.755.850		3.529.800		3.529.800		3.529.800		25	18.3

	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8		8		8		2		2		2		25	0	
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			432.243.400		123.535.985		-		-		-		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4		4		4		0		0		0		0	0	
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			163.764.890		41.151.714		17.655.565		5.977.262		5.977.262		5.977.262	16.7	3.65	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6		5		5		1		1		1		16.7	0	
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			75.694.500		14.707.500		9.121.650		-		-		-	0	0	
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		2		0		0		0		0	0	
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			21.717.200		2.994.100		-		-		-		-	0	0	
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		2		2		0		0		0		0	0	
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			22.958.350		4.789.665		2.571.500		262.500		262.500		262.500	100	1.14	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	10		10		10		10		10		10		100	0	
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			465.700.000		94.511.593		84.939.000		-		-		-	0	0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40		40		40		0		0		0		0	0	
1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			10.062.500		-		2.012.500		-		-		-	0	0	
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	10		0		10		0		0		0		0	0	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.051.082.027		332.580.393		-		-		-		-	0	0	

	Persentase ketersediaan BMD													0	0	
1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		655.789.000		174.819.492			-		-		-		0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3		7		4		0		0		0	0	0	
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		395.293.027		157.760.901			-		-		-		0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		9		9		0		0		0	0	0	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.548.731.300		274.811.542			309.977.060		19.549.776		19.549.776		19.549.776	25	1.26
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah													0	0	
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		18.731.300		2.726.801			3.977.060		396.444		396.444		396.444	25	2.12
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3		3		25	0
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.530.000.000		272.084.741			306.000.000		19.153.332		19.153.332		19.153.332	25	1.25
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3		3		25	0
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.857.271.800		206.700.233			211.454.360		16.070.000		16.070.000		16.070.000	30	0.87
	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik													0	0	
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		195.950.000		39.053.004			39.190.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	100	1.53
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		1		1		1		1		100	0

1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			795.800.00 0	156.106.307	159.160.000	12.620.000	12.620.000	12.620.000	11.8	1.59	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	17	17	17	2	2	2	2	11.8	0	
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			65.521.800	11.540.922	13.104.360	450.000	450.000	450.000	8.33	0.69	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	12	12	1	1	1	1	8.33	0	
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			800.000.000	-	-	-	-	-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			6.299.424.653	5.825.920	210.793.575	5.367.639	5.367.639	5.367.639	18	0.1	Dinas Sosial
	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	100	100	100	20	20	20	20	4	0	
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			56.556.750	5.825.920	-	-	-	-	0	0	
	Persentase Pengumpulan Sumbangan yang berjalan sesuai aturan									0	0	
1.06.02.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			56.556.750	5.825.920	-	-	-	-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	

1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		6.242.867.903	-	210.793.575	5.367.639	5.367.639	5.367.639	22.9	0.09	
	Persentase PSKS yang berjalan sesuai fungsinya								0	0	
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		558.543.650	-	35.530.100	1.237.067	1.237.067	1.237.067	45.5	0.22	
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	11	0	11	5	5	5	45.5	0	
1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		1.722.420.262	-	5.729.800	548.978	548.978	548.978	33.3	0.03	
	Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	6	0	6	2	2	2	33.3	0	
1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota		3.961.405.191	-	169.533.675	3.581.594	3.581.594	3.581.594	12.9	0.09	
	Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	155	0	155	20	20	20	12.9	0	
1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi		498.800	-	-	-	-	-	0	0	

	Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (Orang)	1		0		1		0		0		0		0		
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			11.025.431.225		-		494.672.450		4.070.000		4.070.000		4.070.000	2.9	0	Dinas Sosial
	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi (%)	1 0 0				100		15		15		15		15	0	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			10.955.443.450		-		468.997.100		4.070.000		4.070.000		4.070.000	3.33	0.04	
	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS														0	0	
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Pemakanan			7.158.904.825		-		393.638.675		-		-		-	0	0	
	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1 2 0		0		120		0		0		0		0	0	
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang			1.073.303.800		-		24.050.400		-		-		-	0	0	
	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1		0		1		0		0		0		0	0	
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu			600.000.000		-		-		-		-		-	0	0	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	2		0		0		0		0		0		0	0	

1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		563.287.425	-	51.308.025	4.070.000	4.070.000	4.070.000	20	0.72	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20	0	20	4	4	4	20	0	
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		1.274.947.400	-	-	-	-	-	0	0	
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	130	0	130	0	0	0	0	0	
1.06.04.2.01.0017	Penyediaan Perbekalan Kesehatan		285.000.000	-	-	-	-	-	0	0	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	2	0	0	0	0	0	0	0	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		69.987.775	-	25.675.350	-	-	-	0	0	
	Persentase keadaan darurat yang ditanggapi								0	0	
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan		69.987.775	-	25.675.350	-	-	-	0	0	
	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1	0	1	0	0	0	0	0	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		17.654.888.750	-	316.692.050	3.434.007	3.434.007	3.434.007	0.9	0	Dinas Sosial
	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	100	90	90	10	10	10	10	0	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		17.654.888.750	-	316.692.050	3.434.007	3.434.007	3.434.007	0.91	0.02	

	Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti													0	0	
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		1.034.236.250	-		200.596.200	-	-	-	-	-	0	0			
	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	40000	0		40000	0	0	0	0	0	0	0			
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		8.677.948.250	-		-	-	-	-	-	-	0	0			
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten/Kota (Orang)	5000	0		70	0	0	0	0	0	0	0			
1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		4.047.103.000	-		-	-	-	-	-	-	0	0			
	Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kabupaten/Kota (Orang)	2000	0		55	0	0	0	0	0	0	0			
1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		3.895.601.250	-		116.095.850	3.434.007	3.434.007	3.434.007	3.434.007	3.434.007	3.66	0.09			
	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	32800	0		8200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	3.66	0			
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		1.375.087.500	-		103.468.350	985.000	985.000	985.000	985.000	985.000	1	0.1			Dinas Sosial
	Meningkatnya Penanganan Bencana	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100			100	10	10	10	10	10	10	0			
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		1.274.443.200	-		83.466.850	985.000	985.000	985.000	985.000	985.000	1.67	0.08			
	Persentase PMKS yang mendapat Perlindungan Sosial											0	0			

1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan			737.733.750	-		47.445.750	985.000	985.000	985.000	5	0.13	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100	0	25	5	5	5	5	5	5	0	
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang			426.394.700	-		25.707.950	-	-	-	0	0	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi			110.314.750	-		10.313.150	-	-	-	0	0	
	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			100.644.300	-		20.001.500	-	-	-	0	0	
	Persentase PMKS yang mendapat Pemberdayaan Masyarakat										0	0	
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana			494.800	-		-	-	-	-	0	0	
	Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			100.149.500	-		20.001.500	-	-	-	0	0	

	Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	2		0		2		0		0		0		0		
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			2.092.245.675		-		37.594.050		1.916.250		1.916.250		1.916.250	125	0.1	Dinas Sosial
	Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik (%)	100				100		10		10		10		10	0	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			2.092.245.675		-		37.594.050		1.916.250		1.916.250		1.916.250	125	0.09	
	Persentase terpeliharanya TMP Kusuma Bangsa dan Pejuang 45														0	0	
1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			1.474.957.475		-		28.253.650		1.916.250		1.916.250		1.916.250	250	0.13	
	Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	2		0		2		5		5		5		250	0	
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			617.288.200		-		9.340.400		-		-		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	289		0		289		0		0		0		0	0	
															0	0	
	JUMLAH			63,160,740,881		3,656,418,098		5,098,708,479		762,043,088		762,043,088		762,043,088			
	Rata-rata capaian kinerja (%)														20	1.2	
	Predikat kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	Adanya komitmen, kerjasama yang baik antara PPTK, PPK, BP, BPP dan penyedia barang dan jasa
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. adanya beberapa subkegiatan yang perlu dilakukan perubahan 2. Adanya kendala jaringan 3. Adanya mutasi pegawai menyebabkan perubahan pengelola keuangan 4. Banyak kegiatan yang dimulai di TW 2 dan 3 karena adanya bulan ramadan dan cuti idul fitri 5. Adanya beberapa subkegiatan yang bersifat situasional seperti subkegiatan program penanganan bencana
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	Mempercepat proses administrasi pembayaran dan verifikasi dokumen agar realisasi keuangan setara dengan capaian fisik
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA-SKPD berikutnya	:	akan melakukan perubahan anggaran untuk subkegiatan yang perlu dirubah sesuai dengan kebutuhannya,

2.2 Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan kebijaksanaan teknis Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris, 2 (dua) orang Kepala Bidang, 2 (dua) orang Kasubag, 6 (enam) orang Kepala Seksi, yang dalam melaksanakan tugasnya mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi yang telah ditetapkan yaitu:

1. **Sekretaris** mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
2. **Kasubag Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
3. **Sub Koordinator Program dan Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan keuangan lingkup Dinas.
4. **Kabid Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial.
5. **Kabid Pemberdayaan Sosial** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Sosial.
6. **Sub Koordinator Kepahlawanan, Kesetiakawanan Sosial dan Restorasi Sosial** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Kepahlawanan, Kesetiakawanan Sosial dan Restorasi Sosial.
7. **Sub Koordinator Pengembangan Potensi Sumber dan Pengawasan** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Potensi Sumber dan Pengawasan.
8. **Sub Koordinator Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial, Keluarga dan Masyarakat** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial, Keluarga dan Masyarakat.
9. **Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi Sosial.
10. **Sub Koordinator Perlindungan Sosial** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Sosial.

11. **Sub Koordinator Jaminan Sosial** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Jaminan Sosial.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi diatas, Capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2025 berdasarkan kepada indikator kinerja umum yang telah ditetapkan sebagai mana ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator kinerja utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Kinerja Renstra Dinas Sosial				Rasio Capaian (%)				Rasio Capaian Akhir Renstra (%)	Ket
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
1	2	4	5	6	7	14	15	16	17	18	19
1	Persentase PPKS yang terlayani	80	85	90	95	94	100	95		100	IKU

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi pada Perubahan Renja

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Payakumbuh sebagai perangkat/lembaga teknis yang menyelenggarakan urusan sosial dan urusan dengan prioritas penurunan tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang juga merupakan permasalahan yang terjadi antara lain :

1. Belum Optimalnya Kemandirian PMKS;
2. Belum Optimalnya Peran serta PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Sosial dalam pelaksanaan pelayanan di bidang sosial pada perubahan Renja Dinas Sosial sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya peran dari PSKS dalam mensosialisasikan program-program bantuan yang ada di Dinas Sosial;
2. Masih relatif rendahnya kualitas dari PSKS sehingga butuh adanya pelatihan-pelatihan bagi PSKS;

3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelayakan menerima bantuan;
4. Belum optimalnya penanganan Bencana dari tim cepat tanggap bencana ;
5. Masih diperlukannya nilai-nilai kesetiakawanan Sosial pada masyarakat kota Payakumbuh
6. Masih banyak aparat pemerintah yang belum memahami program sosial;
7. Adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah yang melakukan verifikasi maupun verifikasi data untuk menerima bantuan-bantuan sosial;

Sedangkan ancaman pengembangan pelayanan Dinas Sosial Kota Payakumbuh dalam pelaksanaan pelayanan antara lain :

- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelayakan menerima bantuan
- Masih banyak aparat pemerintah yang belum memahami program sosial
- Adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah yang melakukan verifikasi maupun verifikasi data untuk menerima bantuan-bantuan sosial

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN PENDANAAN DINAS
SOSIAL

3.1 Telaah terhadap Perubahan Kebijakan Nasional

Arah kebijakan RPJMD Kota Payakumbuh yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Payakumbuh adalah :

1. Peningkatan penanggulangan PMKS
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan
3. Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan masalah social dan pengembangan sumber daya tenaga kesejahteraan sosial
4. Peningkatan kesejahteraan social berbasis keluarga

Arah kebijakan lainnya terkait dengan Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)
- b. Peningkatan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi
- c. Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial pada Perubahan Renja 2026

Penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Payakumbuh berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dikaitkan dengan sasaran target kinerja Dinas Sosial Kota Payakumbuh sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Sosial Kota Payakumbuh

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				KET
						2023	2024	2025	2026	
1	Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Persentase Tingkat Kemiskinan	5,16%	Meningkatnya PPKS yang terlayani	Persentase PPKS yang terlayani	80	85	90	95	IKU

3.3 Rencana Kerja pada Perubahan 2026

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Payakumbuh yang terdiri dari 6 program, 12 kegiatan dan 32 Sub kegiatan. Jumlah anggaran RKPD 2026 sebesar Rp 5.833.303.794,00, APBD 2026 sebesar Rp. 5.098.708.479,00 terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami perubahan anggaran yaitu :

A. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - 1) Sub kegiatan Penyediaan Permakanan, sub kegiatan ini perubahan target dari 120 orang menjadi 85 orang
 - 2) Sub Kegiatan sandang sub kegiatan ini perubahan target dari 1 orang menjadi 22 orang
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial
 - 1) Sub kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan, sub kegiatan ini perubahan target dari 1 orang menjadi 20 orang

B. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - 1) Sub kegiatan Penyediaan Sandang sub kegiatan ini perubahan target dari 1 orang menjadi 25 orang
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota
 - 1) Sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana, sub kegiatan ini perubahan target dari 2 orang menjadi 15 orang

Untuk lebih jelasnya ada pada tabel lampiran 2 terlampir.

No	Kode				Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah		
1	2				3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Dinas Sosial		5.940.369.545,00	6.356.430.100,00	5.906.114.625,00								4.614.524.730,00			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		5.940.369.545,00	6.356.430.100,00	5.906.114.625,00								4.614.524.730,00			
	1	0	6			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		5.940.369.545,00	6.356.430.100,00	5.906.114.625,00								4.614.524.730,00			
1	1	0	0	6	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Sosial Oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Sosial	94 A Indeks Kategori	90 94 Nilai Indeks	3.847.064.295,00	4.002.369.250,00	4.034.788.525,00						3.345.505.580,00			
	1	0	0	6	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi program kegiatan renstra dengan renja	100 %	100 %	55.426.500,00	55.426.500,00	55.426.500,00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh	32.855.500,00	DINAS SOSIAL		
	1	0	0	6	1	2.01	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	2.207.000,00	2.207.000,00	1.916.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua	Dana Alo kasi Umum (DA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan		30.857.350,00	DINAS SOSIAL		

No	Kode	Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									Kel/Desa	U)	berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	an daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas				
	106120007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	53.219.500,00	53.219.500,00	73.801.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.998.150,00	DINAS SOSIAL
	1061202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program dan kegiatan	87 %	87 %	2.512.239.575,00	2.667.568.330,00	2.667.568.330,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih,	Pegawai Dinas Sosial Kota Payakumbuh		2.473.940.985,00	DINAS SOSIAL

No	Kode	Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
											mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	akuntabel serta berkualitas				
	1 0 0 2 00 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.356.239.575,00	2.511.568.330,00	2.511.603.176,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			2.317.022.985,00	DINAS SOSIAL
	1 0 0 2 00 02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12 Dokumen	12 Dokumen	156.000.000,00	156.000.000,00	202.700.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan	Dana Alokasi Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan			156.918.000,00	DINAS SOSIAL

No	Kode	Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pelaksanaan Tugas ASN						an, Semua Kel/Desa	um (DAU)	lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	araan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas				
	1061205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Kepegawaian ASN Inspektorat yang sesuai Standar	100 %	100 %	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pegawai Dinas Sosial Kota Payakumbuh		17.002.240,00	DINAS SOSIAL
	10612050002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

No	Kode	Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	15.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			11.997.220,00	DINAS SOSIAL
	10612006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	4.343.500,00	4.343.500,00	3.754.450,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			3.120.480,00	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
															agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	1	0	0	2.	00	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
		6	1	06	08		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	10 Laporan	4.601.100,00	4.601.100,00	7.045.300,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			2.100.000,00	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		6	1	06	09		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	40 Laporan	40 Laporan	195.798.000,00	195.798.000,00	100.970.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan	Dana Alokasi Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan			109.755.000,00	DINAS SOSIAL

No	Kode	Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	9 Unit	87.618.000,00	87.618.000,00	133.360.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			32.412.000,00	DINAS SOSIAL
1	061208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Layanan Umum yang dibayarkan	100 %	100 %	357.458.520,00	357.434.720,00	357.434.720,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengemba	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pegawai Dinas Sosial Kota Payakumbuh		302.452.620,00	DINAS SOSIAL

No	Kode	Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
											ngkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	10610802		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.688.560,00	3.688.560,00	3.688.560,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			10.795.380,00	DINAS SOSIAL

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
											koperasi.					
	10610804		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	353.769.960,00	353.746.160,00	324.701.439,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			291.657.240,00	DINAS SOSIAL

No	Kode	Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
											koperasi.					
1	06109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD milik Dinas Sosial dalam keadaan baik	100 %	100 %	273.060.000,00	273.060.000,00	273.060.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	BMD Dinas Sosial Kota Payakumbuh	187.360.000,00	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	17 Unit	216.640.000,00	216.640.000,00	216.640.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			138.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														06
	6	1	09																	

No	Kode				Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2				3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	13.470.000,00	13.470.000,00	13.470.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			9.970.000,00	DINAS SOSIAL
2	1	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos	70 %	70 %	395.059.000,00	590.057.500,00	436.240.000,00						263.267.880,00	

No	Kode				Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah	
1	2				3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengumpulan Sumbangan yang berjalan sesuai aturan	100 %	100 %	11.311.500,00	11.311.500,00	11.311.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan .	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya masyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Masyarakat Kota Payakumbuh		99.830,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	1 Dokumen	11.311.500,00	11.311.500,00	6.093.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan .	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya masyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah			99.830,00	DINAS SOSIAL	

No	Kode				Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah	
1	2				3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang berjalan sesuai fungsinya	65 %	65 %	383.747.500,00	578.746.000,00	578.746.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan .	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	PSKS Kota Payakumbuh		263.168.050,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
						Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	138 Orang	224.220.000,00	419.220.000,00	342.332.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan .	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah			119.220.950,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota														

No	Kode	Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	120 Orang	130 Orang	440.984.750,00	440.984.750,00	449.492.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah			335.097.970,00	DINAS SOSIAL
	1 0 0 2. 00 6 4 01 02	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Orang	36 Orang	16.207.500,00	24.667.800,00	22.655.300,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah			99.900,00	DINAS SOSIAL
	1 0 0 2. 00 6 4 01 04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														

No	Kode	Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	10 Orang	10 Orang	17.717.250,00	25.321.000,00	23.961.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya masyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah			17.119.250,00	DINAS SOSIAL
	106420005		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial													
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	130 Orang	60 Orang	43.712.150,00	43.712.150,00	30.302.150,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya masyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah			17.758.150,00	DINAS SOSIAL
4	1065		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	100 %	100 %	1.003.543.600,00	1.003.444.600,00	680.239.850,00						474.312.200,00	

No	Kode				Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2				3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	0	0	2.		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	100 %	100 %	1.003.543.600,00	1.003.444.600,00	1.003.444.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan .	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Masyarakat Kota Payakumbuh	474.312.200,00	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.	00	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota													
						Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata	40000 Orang	40000 Orang	239.667.000,00	239.667.000,00	71.374.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan .	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah		326.856.350,00	DINAS SOSIAL	
	1	0	0	2.	00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota													

No	Kode	Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Unit	40 Unit	99.000,00	25.000.400,00	20.750.400,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya masyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah			99.750,00	DINAS SOSIAL
	1062		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	100 %	100 %	20.136.000,00	20.136.000,00	20.136.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya masyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Masyarakat Kota Payakumbuh		199.500,00	DINAS SOSIAL
	106201		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana													

No	Kode	Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Kampung	1 Kampung	99.000,00	99.000,00	99.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah			99.750,00	DINAS SOSIAL
	10602	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana													
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	2 Orang	2 Orang	20.037.000,00	20.037.000,00	20.037.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah			99.750,00	DINAS SOSIAL
6	10607		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang terpelihara	100 %	100 %	105.050.000,00	105.049.250,00	125.086.500,00						93.147.250,00	

No	Kode				Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2				3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Persentase terpeliharaan ya TMP Kusuma Bangsa dan Pejuang 45	100 %	100 %	105.050.000,00	105.049.250,00	105.049.250,00			-	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Taman Makam Pahlawan	93.147.250,00	DINAS SOSIAL
	1	06	07	2.01	0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota													
						Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	56.592.000,00	56.591.500,00	45.761.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan		69.652.050,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota													
						Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	289 Makam	289 Makam	48.458.000,00	48.457.750,00	79.325.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan,		23.495.200,00	DINAS SOSIAL	

No	Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Kota									dan berkelanjutan				
						5.940.369.545,00	6.356.430.100,00	5.906.114.625,00							4.614.524.730,00	

BAB IV

PENUTUP


Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Payakumbuh tahun 2025 mengacu pada evaluasi program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Payakumbuh tahun 2026 sampai dengan triwulan I yang terealisasi sebesar 14,94% dari pagu anggaran yang tersedia.

Program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam perubahan Rencana Kerja ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing- masing.

Dalam pelaksanaan program rutin maupun pembangunan pada Dinas Sosial Kota Payakumbuh baik rutin dan pembangunan akan diimplementasikan secara maksimal guna menunjang penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kota Payakumbuh.

Demikian renja ini disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.

Payakumbuh, April 2026
Kepala Dinas Sosial
Kota Payakumbuh



YONREFLI, S.Sos,M.AP
NIP. 19691108 199 03 1 006